

Ketidaksetaraan Gender, Wahabisme Dan Visi Saudi 2030: Kritik Feminisme Postkolonial Melawan Ketidakadilan Di Arab Saudi

Gender Inequality, Wahhabism, And Saudi Vision 2030: A Postcolonial Feminist Critique Against Injustice In Saudi Arabia

Bangkit Adi Saputra^{1*}, Ita Rodiah¹

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

*Corresponding Author: bangkitadisaputra000@gmail.com

Abstract: This research analyzes gender inequality in Saudi Arabia within the contexts of Wahhabism and Saudi Vision 2030 using Chandra Talpade Mohanty's postcolonial feminist perspective. Through qualitative methodology with a descriptive-analytical approach, this study examines how Wahhabi doctrine has shaped practices that restrict women's roles through the guardianship system, driving ban, and gender segregation. Saudi Vision 2030 has brought significant reforms such as lifting the driving ban, relaxing the guardianship system, and increasing women's workforce participation from 17% (2016) to 33% (2020). However, critical analysis reveals that these reforms function more as instruments of economic modernization and international image improvement rather than fundamental transformations in gender relations. Based on Mohanty's theory, this research identifies three key findings: (1) the importance of understanding gender inequality within specific socio-historical contexts, (2) recognition of Saudi women as active agents negotiating their rights through various forms of resistance, and (3) understanding the intersection between gender policies, global economics, and geopolitics. This research contributes to a more nuanced understanding of the complexities of gender equality struggles in non-Western contexts.

Keywords: Postcolonial Feminism, Wahhabism, Saudi Vision 2030

Received: March 29, 2025

Accepted: May 04, 2025

Published: May 05, 2025

To Cite this Article: Saputra, B. A. ., & Rodiah, I. . (2025). Ketidaksetaraan Gender, Wahabisme Dan Visi Saudi 2030: Kritik Feminisme Postkolonial Melawan Ketidakadilan Di Arab Saudi. *Abdurrauf Law and Sharia*, 2(1), 88-111. <https://doi.org/10.70742/arlash.v2i1.199>



Copyright © 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Abstrak: Penelitian ini menganalisis ketidaksetaraan gender di Arab Saudi dalam konteks Wahabisme dan Visi Saudi 2030 menggunakan perspektif feminisme postkolonial Chandra Talpade Mohanty. Melalui metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, studi ini mengkaji bagaimana doktrin Wahabi telah membentuk praktik-praktik yang membatasi peran perempuan melalui sistem perwalian, larangan mengemudi, dan segregasi gender. Visi Saudi 2030 telah membawa reformasi signifikan seperti pencabutan larangan mengemudi, pelonggaran sistem perwalian, dan peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dari 17% (2016) menjadi 33% (2020). Namun, analisis kritis menunjukkan bahwa reformasi ini lebih merupakan instrumen modernisasi ekonomi dan perbaikan citra internasional daripada transformasi fundamental dalam relasi gender. Berdasarkan teori Mohanty, penelitian ini mengidentifikasi tiga temuan utama: (1) pentingnya memahami ketidaksetaraan gender dalam konteks sosio-historis spesifik, (2) pengakuan perempuan Saudi sebagai agen aktif yang menegosiasikan hak mereka melalui berbagai bentuk resistensi, dan (3) pemahaman terhadap interseksi antara kebijakan gender, ekonomi global, dan geopolitik. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih nuansa tentang kompleksitas perjuangan kesetaraan gender dalam konteks non-Barat.

Kata kunci: Feminisme Postkolonial, Wahabisme, Visi Saudi 2030

Pendahuluan

Ketidaksetaraan gender di Arab Saudi telah lama menjadi isu yang kontroversial dalam konteks global. Arab Saudi termasuk ke dalam negara yang memiliki indeks partisipasi perempuan paling rendah di dunia, terutama pada sektor pekerjaan dan pendidikan. Menurut The Global Gender Gap Index 2010 dalam World Economic Forum, Arab Saudi menempati peringkat 129 dari 134 negara dalam hal kesetaraan gender.¹ Kondisi ini merupakan konsekuensi dari struktur sosial yang dipengaruhi oleh interpretasi konservatif ajaran Islam yang dikenal sebagai mahdzab Wahabi, yang telah menjadi pondasi dasar bagi pemerintah Arab Saudi dalam membuat kebijakan publik di negaranya. Diskriminasi gender di Arab Saudi bukan sekadar masalah kesenjangan akses terhadap sumber daya dan layanan publik, tetapi juga terinstitusionalisasi dalam sistem hukum yang mengikat. Menurut laporan Human Rights Watch,

¹ Ricardo. Hausmann, Laura D'Andrea. Tyson, and Saadia. Zahidi, *The Global Gender Gap Report 2010*, 1st ed., vol. 1 (Geneva: World Economic Forum, 2010), https://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2010.pdf.

perempuan Saudi secara sistematis diperlakukan sebagai warga negara kelas dua, dengan pembatasan hukum yang mencakup hampir seluruh aspek kehidupan mereka.² Data dari Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi (2018) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja hanya mencapai 22%, jauh di bawah rata-rata global sebesar 48,5%.³ Hal ini merefleksikan bagaimana ketidaksetaraan gender telah menjadi karakter dominan dalam struktur sosial Saudi, yang berakar pada interpretasi dogmatis dari ajaran Islam yang dianut negara.

Permasalahan ketidaksetaraan gender di Arab Saudi ditandai dengan berbagai pembatasan terhadap perempuan dalam ruang publik. Pemberdayaan perempuan Arab Saudi masih sangat terbatas, menyebabkan rendahnya partisipasi perempuan di berbagai sektor. Situasi ini terkait erat dengan mahdzab Wahabi yang menjadi doktrin resmi negara, yang memisahkan secara tegas peran laki-laki dan perempuan dalam tatanan sosial. Berdasarkan interpretasi ajaran Wahabi, perempuan ditempatkan terutama dalam ranah domestik, sementara aktivitas di ruang publik menjadi domain laki-laki, dan perempuan yang keluar rumah diwajibkan didampingi oleh mahramnya.⁴ Secara historis, pembatasan terhadap perempuan Saudi telah mengalami fluktuasi sejalan dengan dinamika politik domestik dan internasional. Puncak dari pembatasan ini terjadi setelah peristiwa pendudukan Masjid Al-Haram pada tahun 1979, yang memicu pengetatan interpretasi agama sebagai upaya rezim untuk menenangkan elemen konservatif dalam masyarakat.⁵ Pada periode ini, perempuan Saudi mengalami pembatasan yang lebih ketat dalam hal mobilitas dan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Selama beberapa

² Kenneth Roth, "Saudi Arabia-Events of 2018," Human Rights Watch, 2018, <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/saudi-arabia>.

³ International Labour Organization, *WORLD EMPLOYMENT AND SOCIAL OUTLOOK: Trends for Women 2018*, 1st ed., vol. 1 (Geneva: ILO, 2018), <https://www.ilo.org/public/what/doing/employment-and-social-outlook/publications/women-report>.

⁴ Madawi Al-Rasheed, *A Most Masculine State: Gender, Politics, and Religion in Saudi Arabia*, ed. Charles Tripp et al., *A Most Masculine State*, 1st ed., vol. 1 (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), <https://doi.org/10.1017/cbo9781139015363>.

⁵ Stephane Lacroix, *Awakening Islam: The Politics of Religious Dissent in Contemporary Saudi Arabia*, 1st ed., vol. 1 (London: Harvard University Press, 2011), <https://archive.org/details/awakeningislampo0000lacr/page/n7/mode/1up>.

dekade berikutnya, situasi ini terus berlanjut dengan sedikit perubahan substantif dalam kebijakan gender.

Namun, dinamika politik di Arab Saudi mengalami perubahan signifikan setelah wafatnya Raja Abdullah bin Abdul Aziz pada tahun 2015 dan naiknya Raja Salman bin Abdul Aziz, yang kemudian menunjuk putranya, Muhammad bin Salman, sebagai putra mahkota baru sekaligus Menteri Pertahanan. Pengangkatan Muhammad bin Salman mengakhiri pola tradisional pewarisan tahta dari saudara laki-laki tertua kepada adik laki-laki, menjadi pola pewarisan dari ayah kepada putranya. Perubahan politik ini diikuti dengan peluncuran Visi Saudi 2030 pada akhir tahun 2016, yang mencakup reformasi kebijakan termasuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak-hak mereka di ruang publik.⁶ Visi Saudi 2030 merepresentasikan pergeseran paradigma dalam kebijakan Arab Saudi, dengan tujuan utama diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan pembangunan sektor-sektor ekonomi non-minyak. Dalam konteks ini, peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja menjadi salah satu komponen penting, dengan target peningkatan dari 22% menjadi 30% pada tahun 2030.⁷ Perubahan kebijakan ini menimbulkan pertanyaan penting tentang motivasi dan implikasi jangka panjangnya terhadap struktur gender di masyarakat Saudi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi kebijakan gender di Arab Saudi dengan mengajukan pertanyaan penelitian: Bagaimana teori feminisme postkolonial Mohanty dapat digunakan untuk mengkritisi ketidaksetaraan gender dalam konteks Wahabisme dan Visi Saudi 2030? Secara spesifik, penelitian ini akan: (1) menganalisis bagaimana doktrin Wahabi telah membentuk ketidaksetaraan gender di Arab Saudi; (2) mengkaji perubahan kebijakan gender dalam kerangka Visi Saudi 2030; dan (3) melakukan kritik terhadap kedua fenomena tersebut menggunakan perspektif feminisme postkolonial Chandra Talpade Mohanty.

⁶ Daniel Moshashai, M. Leber Leber, and D. Savage Savage, "Saudi Arabia Plans for Its Economic Future- Vision 2030, the National Transformation Plan and Saudi Fiscal Reform," *British Journal of Middle Eastern Studies* 47, no. 3 (August 20, 2018): 381-401, <https://doi.org/10.1080/13530194.2018.1500269>.

⁷ Saudi Vision 2030, "Vision 2030" (Riyadh, 2016), <https://www.vision2030.gov.sa/>.

Feminisme postkolonial Mohanty menawarkan kerangka teoretis yang powerful untuk memahami kompleksitas ketidaksetaraan gender di Arab Saudi. Teori ini tidak hanya menekankan pentingnya memahami pengalaman perempuan dalam konteks sosio-historis yang spesifik, tetapi juga mengkritisi kecenderungan feminisme Barat yang seringkali menggeneralisasi pengalaman perempuan non-Barat sebagai kelompok homogen yang tertindas.⁸ Dengan mengaplikasikan perspektif Mohanty, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana perempuan Saudi menegosiasikan identitas dan hak mereka dalam konteks yang dibentuk oleh interseksi antara agama, tradisi, politik domestik, dan ekonomi global.

Kajian-kajian sebelumnya mengenai Visi Saudi 2030 cenderung terfokus pada aspek tertentu, seperti keterbatasan peran perempuan dalam pendidikan tinggi dalam penelitian yang dilakukan oleh Azzah Alsubaie dan Karen Jones berjudul “*An Overview of the Current State of Women’s Leadership in Higher Education in Saudi Arabia and a Proposal for Future Research Directions*” (2017)⁹ atau keterbatasan penelitian ilmiah Dorinde, D.M.L. van Eck yang berjudul “*Women and regime stability in Saudi Arabia: The Saudi regime’s use of women’s rights and gender politics as a means to maintain regime stability*” (2019) yang hanya terfokus pada hak-hak perempuan dan stabilitas politik di Arab Saudi.¹⁰ Penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menganalisis ketidaksetaraan gender di Arab Saudi sebelum dan sesudah Visi Saudi 2030 melalui lensa teori feminisme postkolonial Mohanty, yang menyoroti pentingnya kritik terhadap kekuasaan dan dominasi, baik dalam bentuk kolonialisme maupun dalam struktur patriarki yang mempengaruhi kehidupan perempuan.

⁸ Chandra Talpade Mohanty, “Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses,” *Duke University Press: Boundary 2, Spring-Autumn* 13, no. 3 (1984): 333–58, <https://about.jstor.org/terms>.

⁹ Azzah Alsubaie and Karen Jones, “An Overview of the Current State of Women’s Leadership in Higher Education in Saudi Arabia and a Proposal for Future Research Directions,” *Administrative Sciences* 7, no. 4 (December 1, 2017): 1–15, <https://doi.org/10.3390/admsci7040036>.

¹⁰ D.M.L. Van Eck Dorinde, “Women and Regime Stability in Saudi Arabia” (Leiden University, 2019), <https://studenttheses.universiteitleiden.nl/access/item%3A2700790/view>.

Metode

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi kompleksitas ketidaksetaraan gender di Arab Saudi. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur komprehensif yang meliputi berbagai sumber primer dan sekunder. Sumber-sumber tersebut mencakup buku-buku akademik tentang feminisme di Timur Tengah, artikel ilmiah dari jurnal peer-reviewed seperti *Journal of Middle Eastern Studies* dan *Gender & Society*, laporan riset dari organisasi internasional seperti *Human Rights Watch* dan *UN Women*, serta publikasi media daring terpercaya yang meliput perkembangan sosial-politik di Arab Saudi. Untuk memastikan keakuratan dan reliabilitas data, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai perspektif, termasuk karya akademisi lokal Arab Saudi, sarjana internasional, dan laporan dari organisasi non-pemerintah. Selain itu, peneliti juga mengintegrasikan data statistik dari sumber-sumber resmi pemerintah Arab Saudi terkait partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, pendidikan, dan representasi politik untuk memberikan gambaran komprehensif tentang status perempuan dalam masyarakat Saudi.¹¹

Setelah data terkumpul, proses interpretasi data dilakukan melalui beberapa tahap sistematis. Pertama, peneliti melakukan pembacaan mendalam terhadap seluruh bahan untuk memperoleh pemahaman holistik mengenai isu ketidaksetaraan gender di Arab Saudi. Kedua, data dikategorisasi berdasarkan tema-tema utama yang muncul, seperti pengaruh interpretasi agama terhadap kebijakan gender, transformasi sosial-ekonomi dalam Visi 2030, bentuk-bentuk resistensi perempuan Saudi, dan peran geopolitik dalam membentuk dinamika gender. Ketiga, peneliti menggunakan teknik analisis konten untuk mengidentifikasi pola-pola dan kontradiksi dalam wacana mengenai hak-hak perempuan di Arab Saudi. Pada setiap tahap analisis, peneliti secara kritis mempertanyakan asumsi yang mendasari sumber-sumber data, khususnya mengenai representasi perempuan Saudi dalam literatur akademik dan media internasional.¹²

¹¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna, vol. 1 (CV. Syakir Media Press, 2021).

¹² Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Meyniar Albina, 1st ed., vol. 1 (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023).

Kerangka teori feminisme postkolonial Chandra Talpade Mohanty digunakan sebagai lensa interpretatif untuk menganalisis data yang terkumpul. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkritisi representasi monolitik perempuan Arab Saudi sebagai korban yang membutuhkan penyelamatan dan sebaliknya mengartikulasikan kompleksitas pengalaman mereka sebagai agen sosial. Dalam proses interpretasi, peneliti memberi perhatian khusus pada interseksi antara gender, kelas sosial, dan pengaruh politik-ekonomi global dalam membentuk kebijakan gender di Arab Saudi. Peneliti juga mempertimbangkan konteks historis spesifik perkembangan negara Saudi dan pengaruh aliran Wahabi terhadap konstruksi norma-norma gender. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya melampaui analisis simplistik tentang ketidaksetaraan gender di Arab Saudi dan sebaliknya menyoroti dinamika yang kompleks antara faktor agama, ekonomi, politik, dan sosial yang membentuk realitas perempuan Saudi kontemporer, termasuk bagaimana mereka secara aktif menegosiasikan identitas dan hak-hak mereka dalam konteks reformasi Visi 2030.

Hasil dan Pembahasan

Wahabisme dan Konstruksi Ketidaksetaraan Gender

Mahdzab Wahabi yang diprakarsai oleh Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1792) merupakan interpretasi konservatif dari ajaran Islam yang telah menjadi landasan ideologis bagi negara Saudi modern sejak berdirinya pada tahun 1932.¹³ Kerjasama politik antara Muhammad bin Abdul Wahab dengan Muhammad bin Saud pada tahun 1744 menjadi cikal bakal pembentukan legitimasi negara yang berbasis pada interpretasi ajaran Islam yang konservatif.¹⁴ Dalam perkembangannya, Wahabisme menjadi instrumen legitimasi kekuasaan politik yang memengaruhi struktur sosial masyarakat Saudi, termasuk dalam hal relasi gender.¹⁵ Secara teologis, Wahabisme

¹³ Hala Fattah, "‘Wahhabi’ Influences Salafi Responses: Syaikh Mhmud Shukri and The Iraqi Salafi Movement, 1745-1930," *Journal of Islamic Studies*, Oxford University Press 14, no. 2 (May 2003): 127-48, <https://www.jstor.org/stable/26199595>.

¹⁴ Elif Ayşenur Conker, "The Transformation Of The Ottoman Perception Of The Wahhabi Movement: From Negotiation To Confrontation (1745-1818)" (Sabaci University, 2018).

¹⁵ Madawi. Al-Rasheed, *Salman's Legacy : The Dilemmas of a New Era in Saudi Arabia*, 1st ed., vol. 1 (London: Hurst & Company, 2018).

dikarakterisasi oleh interpretasi literal terhadap teks-teks keagamaan dan penolakan terhadap praktik-praktik yang dianggap bid'ah (inovasi). Gerakan ini menekankan kembali kepada Islam murni dengan menolak berbagai bentuk sinkretisme dan pengaruh budaya lokal yang dianggap telah mengkontaminasi ajaran Islam.¹⁶ Dalam konteks relasi gender, interpretasi Wahabi menekankan pemisahan peran antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pemahaman terhadap ajaran agama yang spesifik.¹⁷

Doktrin Wahabi mengenai relasi gender berakar pada prinsip qiwamah (kepemimpinan laki-laki) dan konsep mahram (pendamping laki-laki dari keluarga terdekat). Berdasarkan interpretasi terhadap Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34, Wahabisme menegaskan posisi laki-laki sebagai pemimpin, pelindung, dan penanggungjawab bagi perempuan.¹⁸ Konsep mahram kemudian dikembangkan menjadi praktik yang membatasi mobilitas perempuan, di mana mereka diwajibkan untuk didampingi oleh anggota keluarga laki-laki ketika beraktivitas di ruang publik. Ideologi Wahabi telah membentuk praktik sosial yang sangat membatasi peran perempuan melalui implementasi kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada interpretasi konservatif terhadap hukum syariat. Beberapa manifestasi konkret dari pembatasan tersebut meliputi: pemisahan gender di ruang publik, kewajiban berpakaian tertutup (abaya, hijab, dan niqab), pembatasan peran sosial perempuan dalam ranah domestik, akses terbatas terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta larangan beraktivitas tanpa pendamping mahram.¹⁹

¹⁶ David Dean. Commins, *The Wahhabi Mission and Saudi Arabia*, 1st ed. (New York: I.B. Tauris, 2006), www.ibtauris.com.

¹⁷ Clyde Mark, "CRS Report for Congress Received through the CRS Web The Islamic Traditions of Wahhabism and Salafiyya Febe Armanios Analyst in Middle East Religions and Cultures Foreign Affairs, Defense, and Trade Division Background on Wahhabism," December 23, 2003, <http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2003/24461.htm>].

¹⁸ Eleanor Abdella Doumanto, *Getting God's Ear: Women, Islam, and Healing in Saudi Arabia and the Gulf*, 1st ed., vol. 1 (New York: Columbia University Press, 2000), <https://cup.columbia.edu/book/getting-gods-ear/9780231116671/>.

¹⁹ Philip K Hitti, *History of Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam*, ed. Dedi Slamet Riyadi and Qomaruddin SF, trans. R.Cecep Lukman Yasin and Dedi Slamet Riyadi, 2nd ed., vol. 10 (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), <https://books.google.co.id/books?id=9twFPOygpQAC&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

Sistem perwalian (wali) dalam konteks Arab Saudi telah menjadi mekanisme kontrol yang efektif terhadap perempuan. Di bawah sistem ini, perempuan membutuhkan izin dari wali (ayah, suami, saudara laki-laki, atau bahkan anak laki-laki) untuk melakukan berbagai aktivitas seperti melakukan perjalanan, menikah, membuka rekening bank, atau bahkan menerima perawatan medis tertentu.²⁰ Sistem ini secara efektif membatasi otonomi perempuan dan membuat mereka bergantung pada keputusan laki-laki dalam keluarga mereka, meski mereka sudah dewasa secara hukum. Pembatasan terhadap mobilitas perempuan mencapai puncaknya dengan larangan mengemudi. Sejak tahun 1957 hingga 2018, perempuan Saudi dilarang mengemudi, menjadikan Arab Saudi satu-satunya negara di dunia dengan larangan semacam itu. Meskipun tidak ada undang-undang formal yang melarang perempuan mengemudi, larangan ini diterapkan melalui fatwa dari ulama Wahabi dan praktik administratif yang menolak memberikan SIM kepada perempuan.²¹ Pembatasan ini menyebabkan ketergantungan perempuan pada supir pribadi atau anggota keluarga laki-laki untuk mobilitas mereka, lebih lanjut membatasi otonomi dan akses mereka terhadap ruang publik.

Di sektor pendidikan, meskipun Arab Saudi telah mencapai kemajuan signifikan dalam meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan tinggi (dengan perempuan bahkan melebihi jumlah laki-laki di universitas), kurikulum pendidikan tetap dipengaruhi oleh interpretasi Wahabi yang menekankan peran tradisional perempuan dalam keluarga. Selain itu, fasilitas pendidikan untuk perempuan dan laki-laki dipisahkan secara ketat, dengan standar dan kualitas yang sering tidak setara.²² Pilihan jurusan bagi perempuan juga dibatasi, dengan bidang-bidang tertentu seperti teknik dan hukum yang lama dianggap tidak sesuai bagi perempuan. Dalam hal pekerjaan, perempuan Saudi menghadapi berbagai hambatan struktural yang membatasi partisipasi mereka dalam angkatan kerja. Pemisahan gender di tempat kerja, larangan

²⁰ Amelie Le Renard, *A Society of Young Women- Opportunities of Place, Power, and Reform in Saudi Arabia.*, 1st ed., vol. 1 (Stanford: Stanford University Press, 2014), <https://www.sup.org/books/middle-east-studies/society-young-women>.

²¹ Al-Rasheed, *A Most Masculine State: Gender, Politics, and Religion in Saudi Arabia*.

²² Alsubaie and Jones, "An Overview of the Current State of Women's Leadership in Higher Education in Saudi Arabia and a Proposal for Future Research Directions."

berinteraksi dengan laki-laki non-mahram, dan kebijakan yang mengharuskan izin wali untuk bekerja telah menjadi hambatan signifikan bagi perempuan Saudi untuk memasuki pasar kerja.²³ Akibatnya, tingkat pengangguran di kalangan perempuan Saudi sangat tinggi, mencapai 33% pada tahun 2015, jauh di atas tingkat pengangguran laki-laki yang hanya 5,7%.²⁴

Interpretasi Wahabi terhadap relasi gender tidak dapat dilepaskan dari konteks historis dan geopolitik yang lebih luas. Pengetatan norma-norma gender juga dapat dipahami sebagai respons terhadap pengaruh kolonialisme dan modernitas Barat, di mana identitas budaya dan religius dipertahankan melalui regulasi ketat terhadap perilaku sosial, terutama yang terkait dengan perempuan. Perempuan Saudi dengan demikian menjadi penanda simbolis dari otentisitas budaya dan resistensi terhadap imperialisme kultural Barat. Dinamika relasi antara agama dan negara dalam konteks Saudi juga sangat penting untuk dipahami. Keluarga kerajaan Saudi menjalin aliansi politik dengan ulama Wahabi sebagai basis legitimasi kekuasaan mereka. Sebagai imbalannya, ulama diberikan otoritas luas untuk mengatur kehidupan sosial dan moral masyarakat, termasuk melalui lembaga seperti Komite untuk Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kemungkaran (Hai'a) yang berfungsi sebagai polisi moral yang menegakkan pemisahan gender dan kode berpakaian.²⁵ Dalam konteks ini, kebijakan gender menjadi arena negosiasi kekuasaan antara keluarga kerajaan, ulama, dan berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat Saudi.

Visi Saudi 2030: Reformasi Kebijakan dan Implikasinya bagi Perempuan

²³ Mona Almunajjed, "Ideation Center Insight Women's Employment in Saudi Arabia A Major Challenge," *Booz & Company Inc.*, 2010, https://www.arabdevelopmentportal.com/sites/default/files/publication/235.womens_employment_in_saudi_arabia_a_major_challenge.pdf.

²⁴ General Authority for Statistics, "Labor Market Bulletin 2016 Fourth Quarter Bulletins Labor Market for Q4 2016" (Riyadh, 2016), https://www.stats.gov.sa/documents/20117/2435265/labour_market_fourth_quarter_2016_en001.pdf/4501f5a0-b96d-5e77-e27b-d1baf18b2a35?t=1735150806153.

²⁵ Lacroix, *Awakening Islam: The Politics of Religious Dissent in Contemporary Saudi Arabia*.

Visi Saudi 2030 yang diluncurkan oleh Pangeran Muhammad bin Salman pada 2016 merupakan langkah strategis untuk melakukan transformasi ekonomi dan sosial di Arab Saudi. Program ini memiliki tiga pilar utama: *A Vibrant Society*, *Thriving Economy*, dan *Ambition Nation*. Salah satu aspek penting dalam visi ini adalah komitmen untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekonomi dan kehidupan publik.

A Vibrant Society bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Saudi melalui pengembangan SDM, termasuk perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga, termasuk perempuan.²⁶ Dalam konteks ini, perempuan Saudi diberi peluang lebih besar untuk mengakses pendidikan tinggi, termasuk melalui program beasiswa luar negeri yang sebelumnya lebih banyak dinikmati oleh laki-laki. Selain itu, reformasi dalam sektor kesehatan juga membuka akses yang lebih luas bagi perempuan untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus didampingi oleh mahram.²⁷

Thriving Economy berfokus pada diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada minyak dan gas, termasuk dengan membuka lebih banyak peluang kerja bagi perempuan.²⁸ Program ini menyadari bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, Arab Saudi perlu memanfaatkan seluruh potensi sumber daya manusianya, termasuk perempuan yang selama ini terpinggirkan. Beberapa inisiatif konkret meliputi: pembukaan sektor-sektor pekerjaan baru bagi perempuan, dukungan terhadap kewirausahaan perempuan, dan penciptaan lingkungan kerja yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan perempuan.²⁹

Ambition Nation menekankan pada pembangunan infrastruktur dan reformasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

²⁶ Dina Abdullah Dahlan, "Current State of Female Leadership in Higher Education Institutions in Saudi Arabia," *Cogent Business and Management* 10, no. 3 (November 2, 2023): 1-17, <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2276990>.

²⁷ Stephen Grand and Katherine Wolff, "HOW IS VISION 2030 FARING?," 2019, https://doi.org/10.1007/978-1-349-95321-9_122.

²⁸ Ranaa Madani, "The New Image of Saudi Cultural Shift; MDL Beast Music Festival; Saudi Vision 2030," *Cogent Arts and Humanities* 9, no. 1 (July 27, 2022): 1-13, <https://doi.org/10.1080/23311983.2022.2105511>.

²⁹ Saudi Vision 2030, "Vision 2030."

Dalam konteks ini, perbaikan transportasi publik menjadi prioritas untuk meningkatkan mobilitas perempuan, terutama mereka yang tidak mampu mempekerjakan supir pribadi.³⁰ Implementasi sistem metro di kota-kota besar seperti Riyadh diharapkan dapat memberikan alternatif transportasi yang aman dan terjangkau bagi perempuan. Implementasi Visi Saudi 2030 telah membawa perubahan signifikan dalam kebijakan terkait perempuan.

Beberapa reformasi penting meliputi: 1.) Penghapusan larangan mengemudi bagi perempuan. Pada Juni 2018, Arab Saudi akhirnya mencabut larangan mengemudi bagi perempuan, yang merupakan salah satu pembatasan paling simbolis terhadap kebebasan perempuan di negara tersebut. Reformasi ini tidak hanya meningkatkan mobilitas perempuan tetapi juga memberikan dampak ekonomi positif dengan mengurangi ketergantungan pada supir asing dan membuka peluang kerja baru bagi perempuan sebagai pengemudi taksi dan layanan transportasi online. 2.) Pelonggaran sistem perwalian. Serangkaian dekrit kerajaan sejak 2017 telah secara bertahap melonggarkan sistem perwalian yang membatasi perempuan.³¹ Perempuan Saudi kini diizinkan untuk mengakses layanan pemerintah, membuka bisnis, dan mendapatkan paspor tanpa persetujuan wali. Meskipun sistem perwalian belum sepenuhnya dihapuskan, perubahan ini merupakan langkah signifikan menuju kemandirian perempuan. 3.) Peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Berbagai inisiatif telah diluncurkan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, termasuk subsidi untuk transportasi, dukungan untuk pusat penitipan anak, dan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan perempuan. Hasilnya, tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja meningkat dari 17% pada tahun 2016 menjadi 33% pada tahun 2020, melebihi target awal Visi 2030 sebesar 30%.³² 4.) Pembukaan akses terhadap posisi-posisi kepemimpinan. Perempuan

³⁰ Mega Hardiyanti and Sri Yuniati, "Penjaminan Hak-Hak Perempuan dalam Visi Saudi Arabia 2030 (Guarantee Of Women's Rights In Vision Saudi Arabia 2030)," *Journal of Feminism and Gender Studies* 1, no. 1 (June 12, 2021): 1-11, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index>,.

³¹ D Suryam Dora, "Women in Saudi Arabia Can Now Go to the Doctor and study without a Man's Permission," 2017.

³² General Authority for Statistic, "Statistical Products & Clients (Case of Saudi Arabia to Transform the Statistical Sector)" (Riyadh, 2018),

Saudi kini menduduki berbagai posisi kepemimpinan yang sebelumnya tertutup, termasuk dalam pemerintahan dan sektor swasta. Penunjukan beberapa perempuan sebagai wakil menteri, duta besar, dan pimpinan universitas merupakan indikasi perubahan dalam kebijakan gender.

Pada tahun 2021, 20% dari anggota Majelis Syura (dewan penasihat raja) adalah perempuan, meskipun lembaga ini memiliki kekuasaan yang terbatas. 5.) Reformasi hukum keluarga. Beberapa perubahan dalam hukum keluarga juga telah diimplementasikan, termasuk pemberian hak kepada perempuan untuk mendaftarkan kelahiran, pernikahan, dan perceraian, serta untuk bertindak sebagai wali bagi anak-anak mereka.³³ Namun, reformasi dalam bidang ini masih sangat terbatas, dengan praktik-praktik diskriminatif seperti poligami dan hak cerai sepihak bagi laki-laki yang tetap dipertahankan. 6.) Pelonggaran aturan berpakaian. Meskipun perempuan Saudi masih diharapkan untuk berpakaian konservatif, penegakan kode berpakaian telah dilonggarkan secara signifikan. Kewenangan Komite untuk Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kemungkaran dalam menangkap perempuan yang dianggap tidak berpakaian sesuai norma telah dikurangi, memberikan lebih banyak kebebasan personal bagi perempuan dalam hal berpakaian.³⁴

Namun, perlu dicatat bahwa reformasi ini terjadi dalam kerangka strategi pembangunan ekonomi dan upaya meningkatkan citra internasional Arab Saudi, sehingga perlu dievaluasi secara kritis apakah perubahan-perubahan tersebut benar-benar menantang struktur patriarki yang mendasar atau hanya merepresentasikan akomodasi superfisial terhadap tekanan global.³⁵

Analisis Kritis dengan Perspektif Feminisme Postkolonial Mohanty

<https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/side-events/documents/20180308-2L-Saudi-Arabia.pdf>.

³³ Nur Rahmy, "Normative Construction of Obligations to Balance the Parenting Roles By Working Partners in Gender Equality Perspective," *An-Nisa: Journal of Gender Studies* 16, no. 2 (December 2023): 153–70.

³⁴ Einar Thorsen and Chindu Sreedharan, "#EndMaleGuardianship- Women's Rights, Social Media and the Arab Public Sphere.," *New Media & Society* 21, no. 5 (May 9, 2019): 1121–40, <https://doi.org/10.1177/1461444818821376>.

³⁵ Al-Rasheed, *Salman's Legacy : The Dilemmas of a New Era in Saudi Arabia*.

Chandra Talpade Mohanty, seorang teoretisi feminisme postkolonial, menawarkan kerangka kritis untuk menganalisis ketidaksetaraan gender di luar konteks Barat. Karyanya “Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses” (1984) dan “Feminism Without Borders” (2003) menyediakan alat analisis yang relevan untuk memahami kompleksitas situasi perempuan Saudi dalam konteks sosio-historis yang spesifik.³⁶

Mohanty mengkritik kecenderungan feminisme Barat yang menguniversalkan pengalaman perempuan tanpa mempertimbangkan konteks spesifik. Dalam kasus Arab Saudi, universalisme semacam ini gagal memahami bagaimana perempuan Saudi menegosiasikan identitas dan hak mereka dalam konteks religius dan sosial yang kompleks.³⁷ Reformasi dalam Visi Saudi 2030 tidak dapat dinilai semata-mata dengan standar kesetaraan gender ala Barat, melainkan harus dipahami dalam konteks agama, budaya, dan struktur sosial Saudi. Mohanty menyoroti bagaimana wacana feminisme Barat seringkali merepresentasikan perempuan dari dunia ketiga, termasuk perempuan Muslim, sebagai kelompok homogen yang tertindas.³⁸

Dalam konteks Arab Saudi, narasi semacam ini mengabaikan keragaman pengalaman perempuan Saudi berdasarkan kelas sosial, latar belakang pendidikan, afiliasi kesukuan, dan posisi geografis (desa vs kota). Perempuan Saudi dari keluarga kaya dan berpendidikan tinggi memiliki akses terhadap sumber daya dan kesempatan yang jauh berbeda dari perempuan dari kelas sosial rendah atau daerah pedesaan. Selain itu, kritik Mohanty juga mengarah pada wacana penyelamatan perempuan Muslim dari budaya dan agama mereka sendiri. Narasi ini tidak hanya problematik karena mengabaikan agensi perempuan, tetapi juga sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik internasional.³⁹

³⁶ Chandra Talpade Mohanty, *Feminism Without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity*, 1st ed., vol. 1 (Durham & London: Duke University Press, 2003), <https://hamtramckfreeschool.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/05/mohanty-chandra-feminism-without-borders-decolonizing-theory-practicing-solidarity.pdf>.

³⁷ Srisna J Lahay, “Feminism , Philosophy of Science , and Their Influence on Women ’ s Language,” *Jurnal An-Nisa’: Kajian Perempuan & Keislaman* 15, no. 1 (April 2022): 101–12.

³⁸ Mohanty, “Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses.”

³⁹ Lila Abu-Lughod, “Do Muslim Women Really Need Saving? Anthropological Reflections on Cultural Relativism and Its Others” 104, no. 3 (September 2002): 783–90, <https://doi.org/10.1525/aa.2002.104.3.783>.

Dalam konteks Arab Saudi, kritik terhadap ketidaksetaraan gender sering menjadi alat bagi negara-negara Barat untuk memberikan tekanan politik, tanpa mempertimbangkan kompleksitas dan kontradiksi dalam kebijakan luar negeri mereka sendiri terhadap Arab Saudi.⁴⁰ Ketika menganalisis ketidaksetaraan gender di Arab Saudi, penting untuk mengakui bahwa resistensi perempuan Saudi terhadap pembatasan tidak selalu mengambil bentuk penolakan terbuka terhadap norma religius, melainkan seringkali berupa negosiasi dalam batas-batas yang ada. Beberapa aktivis perempuan Saudi telah berhasil mendorong reformasi hukum melalui kampanye yang adaptif terhadap konteks lokal, strategi yang tidak selalu diakui dalam narasi feminisme Barat.⁴¹

Perspektif feminisme postkolonial juga membantu kita memahami bagaimana perempuan Saudi menegosiasikan identitas mereka dalam konteks modernisasi dan globalisasi. Alih-alih melihat identitas religius sebagai hambatan terhadap kemajuan, banyak perempuan Saudi yang berpendidikan justru menggunakan pemahaman agama sebagai basis untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Melalui interpretasi Islam yang lebih progresif, mereka menantang pembatasan yang didasarkan pada interpretasi patriarki terhadap teks-teks keagamaan.⁴²

Konsep Perempuan Dunia Ketiga sebagai Agen Aktif

Perempuan Saudi telah melakukan berbagai bentuk resistensi terhadap pembatasan yang mereka alami, mulai dari bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari hingga aktivisme politik yang lebih terorganisir. Sebagai contoh, kampanye Women2Drive yang diluncurkan pada tahun 2011 merupakan gerakan akar rumput yang menggunakan media sosial untuk memobilisasi dukungan terhadap hak perempuan untuk mengemudi. Aktivis seperti Manal al-Sharif dan Loujain al-Hathloul menjadi simbol perlawanan perempuan Saudi terhadap pembatasan mobilitas mereka.⁴³ Dalam bidang pendidikan dan profesional, perempuan Saudi telah menjadi agen perubahan yang

⁴⁰ James M. Dorsey, "Saudi Women Behind the Wheel: Prince Mohammed's Litmus Test," October 4, 2017, <http://www.jstor.com/stable/resrep04567>.

⁴¹ Al-Rasheed, *A Most Masculine State: Gender, Politics, and Religion in Saudi Arabia*.

⁴² Le Renard, *A Society of Young Women- Opportunities of Place, Power, and Reform in Saudi Arabia*.

⁴³ Al-Rasheed, *Salman's Legacy : The Dilemmas of a New Era in Saudi Arabia*.

signifikan. Meskipun menghadapi berbagai pembatasan, mereka telah mencapai tingkat pendidikan yang tinggi dan memasuki berbagai bidang profesional. Data menunjukkan bahwa sekitar 60% dari lulusan universitas di Arab Saudi adalah perempuan, meskipun tingkat partisipasi mereka dalam angkatan kerja masih rendah. Ini menunjukkan bagaimana perempuan Saudi aktif memanfaatkan kesempatan yang tersedia untuk mendapatkan pendidikan, bahkan ketika akses ke dunia kerja masih terbatas.⁴⁴

Internet dan media sosial telah menjadi ruang penting bagi perempuan Saudi untuk menyuarakan aspirasi dan mengorganisir gerakan mereka. Platform seperti Twitter, Instagram, dan YouTube menyediakan ruang ekspresi yang relatif aman di mana perempuan Saudi dapat mendiskusikan isu-isu sensitif dan membentuk komunitas virtual yang mendukung.⁴⁵ Melalui platform digital, mereka dapat melampaui batasan-batasan fisik yang dikenakan pada mobilitas mereka dan terhubung dengan jaringan global aktivis dan pembela hak-hak perempuan. Bentuk-bentuk resistensi ini menunjukkan bahwa perempuan Saudi bukan korban pasif dari sistem yang menindas, melainkan agen aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Dengan demikian, pandangan Mohanty tentang perempuan dunia ketiga sebagai agen perubahan aktif sangat relevan dalam konteks Arab Saudi, di mana perempuan terus menegosiasikan posisi mereka dalam struktur sosial yang didominasi oleh laki-laki.

Visi Saudi 2030 memberikan peluang baru bagi aktivisme perempuan, tetapi tetap dalam kerangka yang ditentukan oleh elite politik (mayoritas laki-laki). Pertanyaan kritis yang perlu diajukan adalah sejauh mana perempuan Saudi dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan tersebut dan apakah reformasi ini benar-benar menjawab aspirasi mereka atau hanya merepresentasikan agenda modernisasi dari atas (top-down) yang didorong oleh kepentingan ekonomi dan politik. Analisis terhadap proses perumusan Visi 2030 menunjukkan bahwa perempuan memiliki representasi yang terbatas dalam pengambilan keputusan. Meskipun beberapa perempuan

⁴⁴ General Authority for Statistic, "Statistical Products & Clients (Case of Saudi Arabia to Transform the Statistical Sector)."

⁴⁵ Thorsen and Sreedharan, "#EndMaleGuardianship- Women's Rights, Social Media and the Arab Public Sphere. ."

terlibat dalam Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan yang merumuskan visi tersebut, mereka tetap minoritas dalam struktur pengambilan keputusan.⁴⁶ Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara retorika pemberdayaan perempuan dan keterlibatan aktual mereka dalam proses politik.

Selain itu, reformasi gender dalam Visi 2030 diimplementasikan bersama dengan penindasan terhadap aktivis perempuan, menciptakan paradoks yang mencolok. Pada Mei 2018, saat Arab Saudi bersiap mencabut larangan mengemudi bagi perempuan, pemerintah justru menangkap beberapa aktivis perempuan terkemuka yang telah memperjuangkan hak tersebut selama bertahun-tahun. Penangkapan ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa reformasi harus terjadi dalam parameter yang ditentukan oleh negara, bukan sebagai hasil dari aktivisme akar rumput.⁴⁷ Dalam konteks ini, interpretasi Mohanty tentang agensi perempuan memberikan kerangka yang berguna untuk memahami kompleksitas situasi perempuan Saudi. Alih-alih melihat mereka sebagai penerima pasif dari reformasi yang diprakarsai oleh negara, penting untuk mengakui bahwa perempuan Saudi terus berperan sebagai agen perubahan yang aktif, baik dalam mendukung maupun mengkritisi reformasi Visi 2030 sesuai dengan aspirasi mereka sendiri.

Interseksi Gender, Kolonialisme, dan Ekonomi Global

Aspek ketiga dari teori Mohanty menekankan pentingnya memahami ketidaksetaraan gender dalam konteks kolonialisme dan ekonomi global. Modernisasi di Arab Saudi, termasuk reformasi gender dalam Visi 2030, tidak dapat dipisahkan dari dinamika kapitalisme global dan geopolitik. Narasi pemberdayaan perempuan seringkali menjadi instrumen untuk meningkatkan reputasi internasional dan menarik investasi asing tanpa menantang struktur kekuasaan yang fundamental. Visi Saudi 2030 harus dilihat dalam konteks upaya Arab Saudi untuk meningkatkan legitimasi internasionalnya di tengah tekanan global terkait catatan hak asasi manusia mereka. Sejak tragedi 11 September 2001, Arab Saudi menghadapi kritik internasional yang intensif

⁴⁶ Moshashai, Leber, and Savage, "Saudi Arabia Plans for Its Economic Future- Vision 2030, the National Transformation Plan and Saudi Fiscal Reform."

⁴⁷ Anoushiravan Ehteshami, "Saudi Arabia as a Resurgent Regional Power Introduction: MENA Regional System," *International Spectator* 53, no. 4 (October 2, 2018): 75-94, <https://doi.org/10.1080/03932729.2018.1507722>.

terkait peran ideologi Wahabi dalam radikalisi Islam global. Tekanan ini semakin meningkat setelah Arab Spring pada 2011 yang mengancam stabilitas rezim-rezim otoriter di Timur Tengah.⁴⁸ Dalam konteks ini, reformasi gender menjadi alat diplomasi publik untuk memperbaiki citra internasional Saudi sebagai negara yang progresif dan modern.

Reformasi gender juga tidak dapat dipisahkan dari kepentingan ekonomi dalam Visi 2030. Di tengah harga minyak yang fluktuatif dan kebutuhan untuk diversifikasi ekonomi, Arab Saudi perlu menarik investasi asing dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi non-minyak. Untuk mencapai tujuan ini, negara perlu menampilkan citra yang lebih liberal dan terbuka bagi investor internasional.⁴⁹ Dengan demikian, reformasi gender dapat dilihat sebagai bagian dari strategi branding nasional untuk menarik investasi global. Peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dapat dilihat sebagai langkah progresif menuju kesetaraan gender, tetapi juga dapat dianalisis sebagai strategi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dalam kerangka neoliberal. Meskipun perempuan Saudi kini memiliki lebih banyak peluang di sektor publik, mereka masih beroperasi dalam sistem yang secara struktural tetap patriarkis. Sebagai contoh, pemisahan gender di tempat kerja masih berlaku di banyak sektor, dan beberapa bidang pekerjaan tetap sulit diakses oleh perempuan.⁵⁰

Mohanty menekankan pentingnya memahami bagaimana kapitalisme global dan patriarki saling memperkuat satu sama lain. Dalam konteks Arab Saudi, ini terlihat dalam bagaimana reformasi yang tampaknya memberdayakan perempuan juga dapat menciptakan bentuk-bentuk eksploitasi baru. Sebagai contoh, masuknya perempuan Saudi ke dalam angkatan kerja sering kali terjadi dalam kondisi kerja yang prekariat dan gaji yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, memperkuat kesenjangan ekonomi

⁴⁸ Ehteshami.

⁴⁹ Moshashai, Leber, and Savage, "Saudi Arabia Plans for Its Economic Future- Vision 2030, the National Transformation Plan and Saudi Fiscal Reform."

⁵⁰ Ingo Forstenlechner and Emilie Rutledge, "Unemployment in the Gulf: Time to Update the 'Social Contract,'" *Middle East Policy* 27, no. 2 (2010): 38–51, <https://doi.org/DOI:10.1111/j.1475-4967.2010.00437.x>.

berdasarkan gender.⁵¹ Analisis interseksional juga menyoroti bagaimana upaya modernisasi Arab Saudi melalui Visi 2030 perlu dipahami dalam konteks geopolitik yang lebih luas, termasuk upaya negara untuk memperbaiki citranya di mata internasional terutama dalam hal standar hak asasi manusia. Reformasi gender menjadi komponen strategis dalam diplomasi publik Saudi, terutama untuk mengatasi kritik internasional terhadap catatan hak asasi manusia mereka.⁵²

Selain itu, modernisasi Saudi dalam Visi 2030 juga dipengaruhi oleh dinamika regional dan persaingan dengan negara-negara tetangga. Persaingan dengan Qatar dan Iran, misalnya, telah mendorong Arab Saudi untuk memperbaiki citranya sebagai negara moderat dan terbuka terhadap perubahan. Dalam konteks ini, reformasi gender menjadi bagian dari strategi soft power untuk memperkuat posisi Saudi dalam politik regional. Perspektif Mohanty juga membantu kita memahami bagaimana modernisasi selektif yang diterapkan dalam Visi 2030 menciptakan bentuk-bentuk hibriditas baru yang mempertahankan elemen-elemen patriarki sambil mengadopsi beberapa aspek modernitas. Misalnya, meskipun perempuan kini diizinkan mengemudi, mereka masih menghadapi pembatasan signifikan dalam hal hukum keluarga dan pernikahan. Ini menunjukkan adanya modernisasi tanpa demokratisasi di mana perubahan tertentu diizinkan untuk tujuan ekonomi dan citra internasional, sementara kontrol sosial dan politik tetap dipertahankan.⁵³

Mohanty juga menekankan pentingnya memperhatikan suara-suara lokal dalam perjuangan hak perempuan, alih-alih mengaplikasikan solusi yang dipaksakan dari luar. Dalam konteks Arab Saudi, hal ini berarti mendengarkan aspirasi perempuan Saudi sendiri tentang bagaimana mereka ingin menegosiasikan identitas dan hak-hak mereka dalam konteks sosial dan religius yang spesifik. Beberapa aktivis perempuan Saudi, misalnya, menekankan pentingnya reformasi dalam kerangka Islam, yang mereka anggap

⁵¹ Abdallah M. Elamin and Katlin Omair, "Males' Attitudes towards Working Females in Saudi Arabia," *Personnel Review* 39, no. 6 (2010): 746-66, <https://doi.org/10.1108/00483481011075594>.

⁵² Al-Rasheed, *Salman's Legacy: The Dilemmas of a New Era in Saudi Arabia*.

⁵³ Naomi Sakr, "Women and Media in Saudi Arabia- Rhetoric, Reductionism and Realities.," *British Journal of Middle Eastern Studies* 35, no. 3 (December 8, 2008): 385-404, <https://doi.org/10.1080/13530190802525197>.

lebih otentik dan efektif dalam konteks lokal daripada mengadopsi model sekular ala Barat.⁵⁴

Secara keseluruhan, perspektif interseksional Mohanty memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap reformasi gender dalam Visi Saudi 2030, dengan mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor ekonomi, politik, dan geopolitik saling berinteraksi dalam membentuk kebijakan gender. Pendekatan ini juga menyoroti pentingnya mendengarkan suara perempuan lokal dalam mendefinisikan agenda pemberdayaan mereka sendiri, alih-alih mengaplikasikan model universal yang didasarkan pada pengalaman Barat.

Kesimpulan

Ketidaksetaraan gender di Arab Saudi dibentuk oleh interaksi kompleks antara interpretasi konservatif agama (Wahabisme), konteks sosio-historis, dan dinamika geopolitik global. Meskipun Visi Saudi 2030 membawa perubahan signifikan dalam kebijakan terkait perempuan seperti penghapusan larangan mengemudi dan pelonggaran sistem perwalian, reformasi ini lebih merupakan instrumen modernisasi ekonomi daripada transformasi fundamental dalam relasi gender. Perubahan tersebut diimplementasikan dalam kerangka kepentingan ekonomi dan perbaikan citra internasional, sementara aspek lain dari ketidaksetaraan seperti diskriminasi dalam hukum keluarga tetap relatif tidak tersentuh.

Penting untuk mengakui perempuan Saudi sebagai agen aktif yang menegosiasikan hak dan identitas mereka melalui berbagai bentuk resistensi, dari praktik perlawanan sehari-hari hingga aktivisme terorganisir seperti kampanye Women2Drive. Mereka secara kreatif memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk bersuara dan memobilisasi dukungan. Dalam konteks Visi 2030, perempuan Saudi terus memperjuangkan ruang yang lebih luas untuk partisipasi mereka, meskipun masih dalam kerangka yang didominasi elite politik laki-laki. Dengan demikian, modernisasi dan reformasi gender di Arab Saudi harus dipahami dalam konteks interseksi antara politik domestik, ekonomi global, dan geopolitik, dimana pemberdayaan perempuan menjadi bagian dari strategi diplomasi publik dan agenda ekonomi untuk diversifikasi dalam era pasca-minyak.

⁵⁴ Le Renard, *A Society of Young Women- Opportunities of Place, Power, and Reform in Saudi Arabia*.

Daftar Pustaka

- Abdullah Dahlan, Dina. "Current State of Female Leadership in Higher Education Institutions in Saudi Arabia." *Cogent Business and Management* 10, no. 3 (November 2, 2023): 1-17. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2276990>.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. Vol. 1. CV. Syakir Media Press, 2021.
- Abu-Lughod, Lila. "Do Muslim Women Really Need Saving? Anthropological Reflections on Cultural Relativism and Its Others" 104, no. 3 (September 2002): 783-90. <https://doi.org/10.1525/aa.2002.104.3.783>.
- Almunajjed, Mona. "Ideation Center Insight Women's Employment in Saudi Arabia A Major Challenge." *Booz & Company Inc.*, 2010. https://www.arabdevelopmentportal.com/sites/default/files/publication/235.womens_employment_in_saudi_arabia_a_major_challenge.pdf.
- Al-Rasheed, Madawi. *A Most Masculine State: Gender, Politics, and Religion in Saudi Arabia*. Edited by Charles Tripp, Julia Clancy Smith, F. Gregory Gause, Yezid Sayigh, Shlaim. Avi, and Judith E. Tucker. *A Most Masculine State*. 1st ed. Vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. <https://doi.org/10.1017/cbo9781139015363>.
- Al-Rasheed, Madawi. *Salman's Legacy : The Dilemmas of a New Era in Saudi Arabia*. 1st ed. Vol. 1. London: Hurst & Company, 2018.
- Alsubaie, Azzah, and Karen Jones. "An Overview of the Current State of Women's Leadership in Higher Education in Saudi Arabia and a Proposal for Future Research Directions." *Administrative Sciences* 7, no. 4 (December 1, 2017): 1-15. <https://doi.org/10.3390/admsci7040036>.
- Commings, David Dean. *The Wahhabi Mission and Saudi Arabia*. 1st ed. New York: I.B. Tauris, 2006. www.ibtauris.com.
- Conker, Elif Ayşenur. "The Transformation Of The Ottoman Perception Of The Wahhabi Movement: From Negotiation To Confrontation (1745-1818)." Sabaci University, 2018.
- Dorinde, D.M.L. Van Eck. "Women and Regime Stability in Saudi Arabia." Leiden University, 2019. <https://studenttheses.universiteitleiden.nl/access/item%3A2700790/view>.

- Dorsey, James M. "Saudi Women Behind the Wheel: Prince Mohammed's Litmus Test," October 4, 2017. <http://www.jstor.com/stable/resrep04567>.
- Doumanto, Eleanor Abdella. *Getting God's Ear- Women, Islam, and Healing in Saudi Arabia and the Gulf*. 1st ed. Vol. 1. New York: Columbia University Press, 2000. <https://cup.columbia.edu/book/getting-gods-ear/9780231116671/>.
- Ehteshami, Anoushiravan. "Saudi Arabia as a Resurgent Regional Power Introduction: MENA Regional System." *International Spectator* 53, no. 4 (October 2, 2018): 75-94. <https://doi.org/10.1080/03932729.2018.1507722>.
- Elamin, Abdallah M., and Katlin Omair. "Males' Attitudes towards Working Females in Saudi Arabia." *Personnel Review* 39, no. 6 (2010): 746-66. <https://doi.org/10.1108/00483481011075594>.
- Fattah, Hala. "'Wahhabi' Influences Salafi Responses: Syaikh Mhmud Shukri and The Iraqi Salafi Movement, 1745-1930." *Journal of Islamic Studies, Oxford University Press* 14, no. 2 (May 2003): 127-48. <https://www.jstor.org/stable/26199595>.
- Forstenlechner, Ingo, and Emilie Rutledge. "Unemployment in the Gulf: Time to Update the 'Social Contract.'" *Middle East Policy* 27, no. 2 (2010): 38-51. <https://doi.org/DOI:10.1111/j.1475-4967.2010.00437.x>.
- General Authority for Statistic. "Statistical Products & Clients (Case of Saudi Arabia to Transform the Statistical Sector)." Riyadh, 2018. <https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/side-events/documents/20180308-2L-Saudi-Arabia.pdf>.
- General Authority for Statistics. "Labor Market Bulletin 2016 Fourth Quarter Bulletins Labor Market for Q4 2016." Riyadh, 2016. https://www.stats.gov.sa/documents/20117/2435265/labour_market_fourth_quarter_2016_en001.pdf/4501f5a0-b96d-5e77-e27b-d1baf18b2a35?t=1735150806153.
- Grand, Stephen, and Katherine Wolff. "HOW IS VISION 2030 FARING?," 2019. https://doi.org/10.1007/978-1-349-95321-9_122.
- Hardiyanti, Mega, and Sri Yuniati. "Penjaminan Hak-Hak Perempuan dalam Visi Saudi Arabia 2030 (Guarantee Of Women's Rights In Vision Saudi

- Arabia 2030)." *Journal of Feminism and Gender Studies* 1, no. 1 (June 12, 2021): 1-11. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index>.
- Hausmann, Ricardo., Laura D'Andrea. Tyson, and Saadia. Zahidi. *The Global Gender Gap Report 2010*. 1st ed. Vol. 1. Geneva: World Economic Forum, 2010.
https://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2010.pdf.
- Hitti, Philip K. *History of Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam*. Edited by Dedi Slamet Riyadi and Qomaruddin SF. Translated by R.Cecep Lukman Yasin and Dedi Slamet Riyadi. 2nd ed. Vol. 10. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.
<https://books.google.co.id/books?id=9twFPOygpQAC&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- International Labour Organization. *WORLD EMPLOYMENT AND SOCIAL OUTLOOK: Trends for Women 2018*. 1st ed. Vol. 1. Geneva: ILO, 2018.
https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/women_report.pdf.
- Lacroix, Stephane. *Awakening Islam: The Politics of Religious Dissent in Contemporary Saudi Arabia*. 1st ed. Vol. 1. London: Harvard University Press, 2011.
<https://archive.org/details/awakeningislampo0000lacr/page/n7/mode/1up>.
- Lahay, Srisna J. "Feminism , Philosophy of Science , and Their Influence on Women ' s Language." *Jurnal An-Nisa': Kajian Perempuan & Keislaman* 15, no. 1 (April 2022): 101-12.
- Madani, Ranaa. "The New Image of Saudi Cultural Shift; MDL Beast Music Festival; Saudi Vision 2030." *Cogent Arts and Humanities* 9, no. 1 (July 27, 2022): 1-13. <https://doi.org/10.1080/23311983.2022.2105511>.
- Mark, Clyde. "CRS Report for Congress Received through the CRS Web The Islamic Traditions of Wahhabism and Salafiyya Febe Armanios Analyst in Middle East Religions and Cultures Foreign Affairs, Defense, and Trade Division Background on Wahhabism," December 23, 2003.
<http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2003/24461.htm>].
- Mohanty, Chandra Talpade. *Feminism Without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity*. 1st ed. Vol. 1. Durham & London: Duke University

- Press, 2003. <https://hamtramckfreeschool.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/05/mohanty-chandra-feminism-without-borders-decolonizing-theory-practicing-solidarity.pdf>.
- . “Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses.” *Duke University Press: Boundary 2, Spring-Autumn* 13, no. 3 (1984): 333–58. <https://about.jstor.org/terms>.
- Moshashai, Daniel, M. Leber Leber, and D, Savage Savage. “Saudi Arabia Plans for Its Economic Future- Vision 2030, the National Transformation Plan and Saudi Fiscal Reform.” *British Journal of Middle Eastern Studies* 47, no. 3 (August 20, 2018): 381–401. <https://doi.org/10.1080/13530194.2018.1500269>.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Meyniar Albina. 1st ed. Vol. 1. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.
- Rahmy, Nur. “Normative Construction of Obligations to Balance the Parenting Roles By Working Partners in Gender Equality Perspective.” *An-Nisa: Journal of Gender Studies* 16, no. 2 (December 2023): 153–70.
- Renard, Amelie Le. *A Society of Young Women- Opportunities of Place, Power, and Reform in Saudi Arabia*. 1st ed. Vol. 1. Stanford: Stanford University Press, 2014. <https://www.sup.org/books/middle-east-studies/society-young-women>.
- Roth, Kenneth. “Saudi Arabia-Events of 2018.” Human Rights Watch, 2018. <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/saudi-arabia>.
- Sakr, Naomi. “Women and Media in Saudi Arabia- Rhetoric, Reductionism and Realities. .” *British Journal of Middle Eastern Studies* 35, no. 3 (December 8, 2008): 385–404. <https://doi.org/10.1080/13530190802525197>.
- Saudi Vision 2030. “Vision 2030.” Riyadh, 2016. <https://www.vision2030.gov.sa/>.
- Suryam Dora, D. “Women in Saudi Arabia Can Now Go to the Doctor and study without a Man’s Permission,” 2017.
- Thorsen, Einar, and Chindu Sreedharan. “#EndMaleGuardianship- Women’s Rights, Social Media and the Arab Public Sphere. .” *New Media & Society* 21, no. 5 (May 9, 2019): 1121–40. <https://doi.org/10.1177/1461444818821376>.